DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori.2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* Pilar Media, Yogyakarta

Abdurrahman. 1983. Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung

Adrian Sutedi. 2008. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta

Ahmad Azhar Basyir. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Al-Maarif, Bandung

Anwar Mohammad.1979. Fiqh Islam tentang Muamalat, Munakahat dan Jinayat, Alma'arif, Bandung

AP. Parlindungan.1990. Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Edisi ke-2,* Mandar Maju, Bandung

Bachtiar Effendie.1983 Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung

Boedi Harsono.2003. Hukum Agraria (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta

Departemen Agama.2004. *Fiqih Wakaf,* Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Jakarta

Elsa Kartika Sari.2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Lampiran, Grasindo, Jakarta

Herman Hermit. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda,* Mandar Maju, Bandung

Irawan Soerjono. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Jakarta

Mhd. Yamin Lubis dan Rahim Lubis. 2010. Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung

Rachmadi Usman. 2009. Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Sudikno Mertokusumo.1988. Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945, PT Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.